

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN
TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*



Disusun Oleh :

RAHMA DINDA YUNISTIN

19060055

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

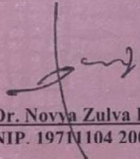
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

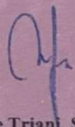
NAMA : Rahma Dinda Yunistin
BP/NIM : 2019/19060055
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2023

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan oleh :
Pembimbing,


Dr. Novva Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001


Mike Triani, SE.M.M
NIP.19840129 200912 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

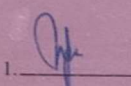
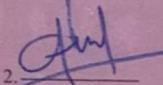
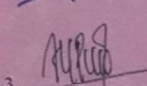
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Rahma Dinda Yunistin
NIM/TM : 19060055/2019
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, November 2023

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Mike Triani, SE, M.M	1. 
2.	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	: Yollit Permata Sari, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rahma Dinda Yunistin
NIM/TM : 19060055/2019
Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Basung/ 19 Desember 2000
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jln Pelita No.41 Kubu Cubadak, Kel.Koto Panjang,Kota Padang Panjang
No. HP/Telepon : 082172794046
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,Pengeluaran Pemerintah dan
Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi
Sumatera Barat

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di PerguruanTinggi.

Padang, November 2023

Yang Menyatakan,



Rahma Dinda Yunistin

NIM. 19060055

ABSTRAK

Rahma Dinda Yunistin (19060055) : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Di bawah Bimbingan ibu Mike Triani, SE, MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada penelitian ini ditetapkan sebagai kemiskinan dan variabel bebas yaitu pertumbuhan Ekonomi , Pengeluaran Pemerintah, dan Pengangguran Terbuka.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel tahun 2017-2021 di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat . Sedangkan variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Kata Kunci :*Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi dan data panel.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya kepada umatnya. Atas izin dan kehendak Allah SWT penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat*”.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini atas izin Allah SWT sebagai pemegang kendali. Penulis juga sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga kendala dan rintangan dapat diatasi, semua ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan segenap keluarga besar yang selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus akan membuahkan hasil yang maksimal.

Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Teristimewa dan terhormat kepada ayahanda M Yunis dan ibunda Agustina serta keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi, menasehati, memberikan semangat baik moril maupun material kepada penulis demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Mike Triani, S.E, M.M selaku pembimbing skripsi, yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Perengki Susanto,SE.,M.Sc.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang beserta Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE. M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Ariusni,SE,M.Si selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yollit Permata Sari,SE,M.Si selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
8. Kak Asma Lidya, AMd selaku admin departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.
9. Kepada Muhamad Afief Suherman yang selalu memberi semangat dan selalu membangunkan rasa percaya diri penulis bahwa penulis pasti sanggup menyelesaikan skripsi dan menjadi sarjana ekonomi.

10. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendengar keluh kesah dan memberi semangat kepada penulis.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca terhadap skripsi ini agar dapat menjadi karya yang bernilai dan bermanfaat.

Padang, September 2023

Rahma Dinda Yunistin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	12
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	27
C. Batasan Masalah.....	28
D. Tujuan Penelitian	28
E. Manfaat Penelitian.....	28
BAB II	30
TINJAUAN LITERATUR	30
A. Kajian Teori	30
1. Kemiskinan	31
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	38
3. Pengeluaran Pemerintah.....	47
4. Pengangguran.....	52
B. Penelitian Terdahulu	58
C. Kerangka Konseptual	63
D. Hipotesis.....	66
BAB III.....	69
METODOLOGI PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Tempat dan Waktu Penelitian	69
C. Jenis dan Sumber Data	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70

A. Defenisi Operasional.....	71
F. Teknik Analisis Data	73
BAB IV	84
HASIL DAN PEMBAHASAN	84
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	84
B. Deskripsi Variabel Penelitian	85
C. Analisis Data.....	91
D. Pembahasan Hasil Penelitian	99
BAB V.....	104
KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah di.....	17
Gambar 1.2 Laju PDRB atas Harga Konstan	19
Gambar 1.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah.....	22
Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	24
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Miskin	86
Tabel 4.2 Laju PDRB atas harga konstan 19 Kabupaten/Kota	87
Tabel 4.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah	89
Tabel 4.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	90
Tabel 4.5 Uji Chow	92
Tabel 4.6 Uji Hausman	93
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas	94
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas	94
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang sering dikaitkan dengan tidak memadainya kekuatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan secara absolut didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan atau kemakmuran ekonominya sesuai dengan standar hidup di suatu wilayah tertentu. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau wilayah tersebut (Christianto, 2013). Mubyarto (2004) mengatakan bahwa kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang

dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Menurut Maipita, I (2014:3) penyebab kemiskinan bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor, tetapi secara garis besar kemiskinan dapat ditimbulkan oleh adanya perbedaan sumberdaya. Selain itu kemiskinan juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja, keterbatasan dan sulitnya akses terhadap kepemilikan modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tingginya pertumbuhan penduduk (Sharp et al. dalam Maipita, I, 2014)

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang merupakan permasalahan yang cukup rumit. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multidimensional. Kemiskinan yang terjadi di suatu negara harus sangat diperhatikan, karena permasalahan ini dapat membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena selama ini kemiskinan belum memiliki strategi yang cukup baik dalam pengentasan permasalahan di masyarakat, harus ada solusi atau kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan yang di buat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan dengan terpadu dan menyeluruh.

Di Indonesia masalah kemiskinan masih menjadi pusat perhatian. Upaya dalam penanggulangan kemiskinan ini telah dilakukan melalui berbagai cara, bahkan merupakan salah satu program prioritas. Diantaranya dilakukan dengan pemberian dana bantuan stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi

produktif serta bantuan sosial lainnya. Selain itu pemerintah juga melaksanakan kinerja perekonomian dengan cara melakukan pembangunan nasional agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak demi mewujudkan kesejahteraan penduduk di Indonesia. Berbagai program kegiatan pembangunan telah digerakkan, khususnya daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pembangunan nasional tentunya harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin (Simatupang & Dermoredjo, 2003)

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

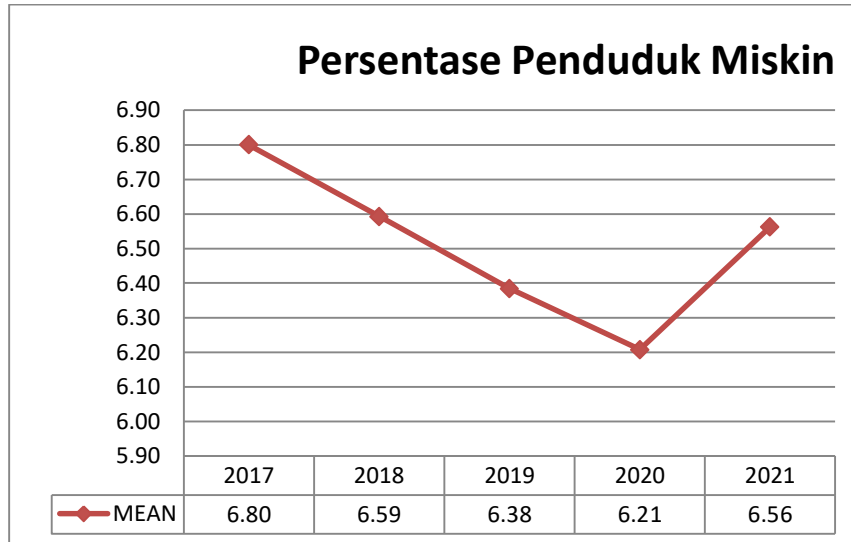
Problem yang juga di hadapi oleh Provinsi Sumatera Barat adalah permasalahan masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Sumatera Barat bisa di katakan tinggi, di tambah lagi dari efek pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019. Kemiskinan menjadi masalah yang sangat serius, hal ini

di sebabkan oleh mati nya semua mata pencarian masyarakat. Oleh karena ini banyak masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan bertambah juga jumlah pengangguran karena banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan. Hal ini tidak lain karena efek pandemi yang berdampak terhadap banyak perusahaan.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangat serius dan merupakan program utama. Menurut Mahyeldi (2022) upaya yang dilakukan berupa pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial berupa lapangan pekerjaan, perumahan, pangan, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan serta air bersih dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dapat semakin ditingkatkan.

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat belum memperlihatkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin yang masih mengalami naik turun dalam setiap tahun. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari badan pusat statistik, Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase penduduk miskin dari periode 2017 sampai dengan 2021 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah di Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar 1.1 menjelaskan tentang persentase penduduk miskin menurut wilayah di Sumatera Barat pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai angka 6,80 persen sedangkan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai angka 6,21 persen dan menjadi angka terendah selama periode 2017-2021. Jika dilihat secara menyeluruh persentase penduduk miskin cenderung menurun dari tahun ke tahun meski tidak secara signifikan.

Penurunan dalam jumlah kemiskinan mengindikasikan bahwa pembangunan yang dijalankan di suatu wilayah membawa sebuah keberhasilan. Saat perekonomian di suatu wilayah dapat berkembang, tentu akan menambah pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang jika dikelola dengan baik akan berdampak pada penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini berarti,

pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang penting dalam mengatasi penurunan jumlah kemiskinan (Kuncoro dalam Asrianti, 2017)

Menurunnya tingkat kemiskinan pada suatu wilayah merupakan tanda bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah membawa sebuah keberhasilan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Banyak studi tentang pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran terbuka telah muncul. Hal tersebut menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu negara. Kemiskinan, pengangguran, dan inflasi merupakan fenomena global yang menakutkan yang memengaruhi orang-orang di berbagai tingkatan pada waktu dan fase kehidupan yang berbeda (Siyan & Adegoriola, 2017).

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama dalam pengentasan kemiskinan, dan yang kedua adalah ekonomi yang pro poor growth (Thamrin & Hasan, 2018). Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, namun biasanya pertumbuhan ekonomi adalah sesuatu yang dibutuhkan. Namun pertumbuhan ekonomi yang baik tidak akan menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk miskin jika tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan (Misini & Pantina, 2017)

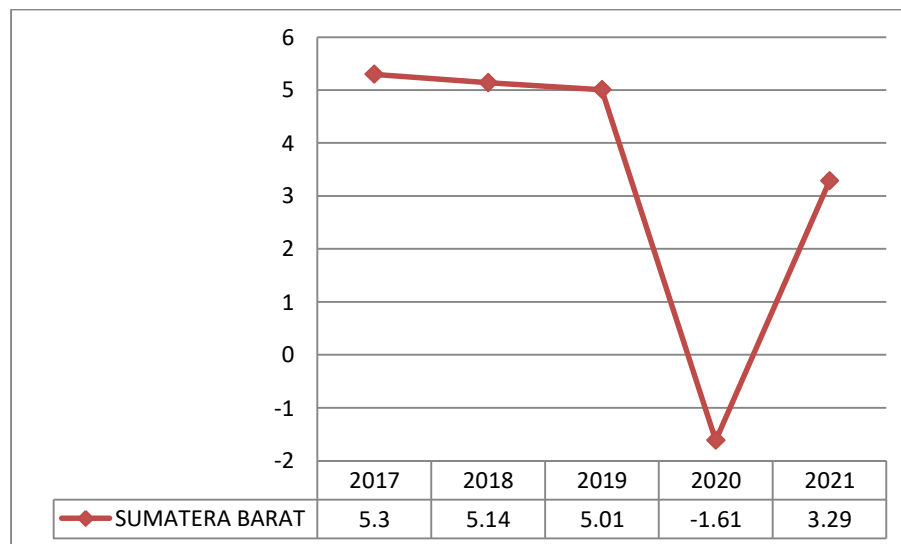
Saat perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau wilayah tertentu yang lebih kecil), terdapat banyak pendapatan untuk di belanjakan, dan jika berdistribusi dengan baik diantara penduduk di kawasan tersebut akan dapat mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan

yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Sedangkan tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas produksi yang membutuhkan tambahan tenaga kerja agar jumlah pengangguran menurun dan tingkat kemiskinan akan berkurang.

Dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah adalah laju PDRB atas harga konstan 2010.

***Gambar 1.2 Laju PDRB atas Harga Konstan
di Sumatera Barat tahun 2017-2021 (persen)***



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gambar 1.2 menunjukkan laju PDRB atas harga konstan pada tahun 2017 sebesar 5,3 persen sampai tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis hingga menyentuh angka -1.61 persen. Beberapa sektor PDRB mengalami kontraksi pada tahun 2020 diantaranya seperti sektor transportasi, sektor perdagangan, pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan beberapa sektor lainnya akibat adanya pandemi Covid-19. Dampak negatif Covid-19 memang sangat berpengaruh terhadap seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Persoalan kemiskinan memang menjadi salah satu tujuan kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk menanggulangi kemiskinan dibutuhkan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya belanja modal adalah suatu bentuk kerja nyata dan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu belanja modal diberikan dalam berbagai sektor pembangunan diantaranya pembangunan serta perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga merasakan manfaat dari pembangunan daerah ini dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat.

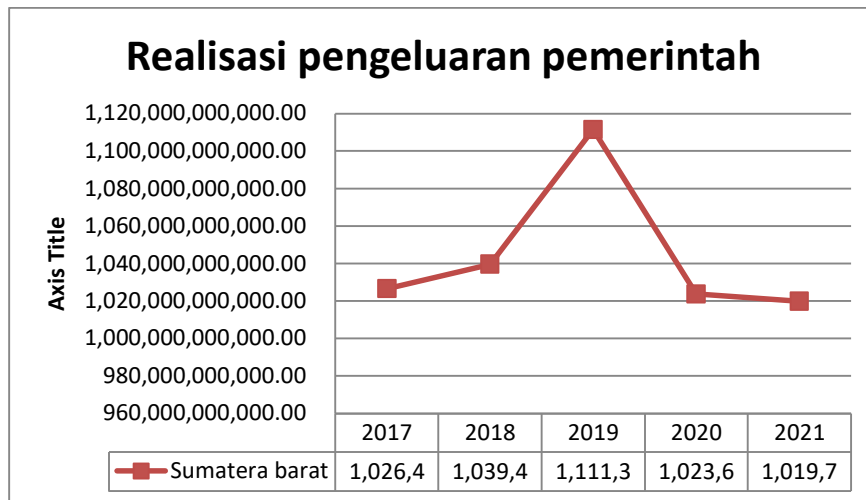
Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah sendiri dapat diukur dengan seberapa besar pertumbuhan

ekonomi tersebut dicapai. Dalam perkembangannya alat indikator ini tidak hanya atas pertumbuhan ekonomi namun juga berdasarkan seberapa tinggi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Walaupun karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan alat indikator utama sebelum indikator lainnya. Ini alasan kenapa pemerintah sering hanya menekankan pada tercapainya pembangunan lainnya, terlebih kenyataan yang terjadi di masyarakat. Seringkali, tingginya suatu pertumbuhan ekonomi tidak menjangkau kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung kepada jasa yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1989)

Gambar1.3. Realisasi Pengeluaran Pemerintah

Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Sumbar

Gambar 1.3 menunjukkan realisasi pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat pada tahun 2017-2021. Pengeluaran pemerintah terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2019 pengeluaran pemerintah merupakan angka tertinggi yaitu sebesar Rp 1,111,397,477,734.84.

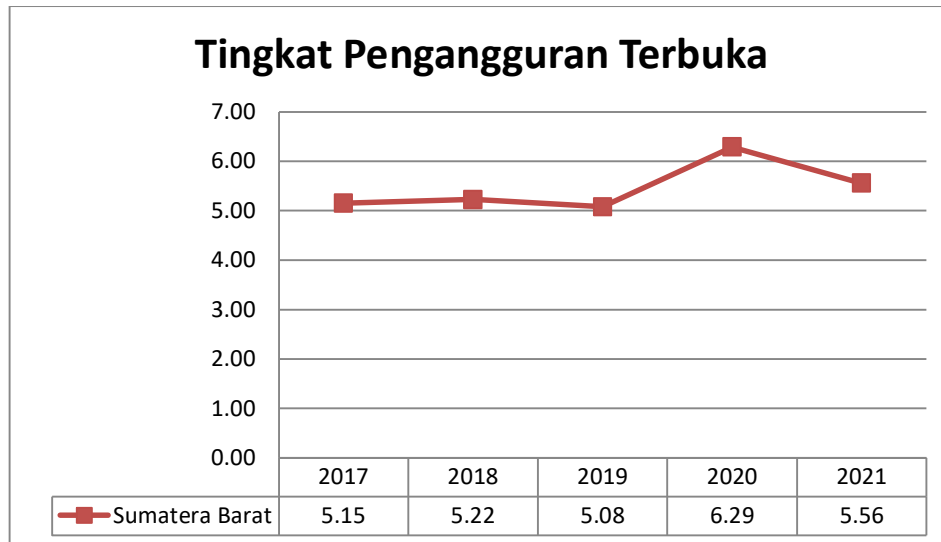
Realisasi Belanja dalam APBD merupakan kenyataan mengenai pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) serta Pendapatan Asli Kabupaten/Kota di Sumatera Barat merupakan sumber pembelanjaan dan pengeluaran bagi pemerintah daerah amanah Undang-Undang No.32 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu berdasarkan

semangat otonomi daerah dalam menjalankan amanat Undang Undang maka sudah seharusnya pemerintah daerah bijak dalam pengelolaan keuangan daerah sebab dengan adanya dana dalam jumlah besar yang diberikan oleh pemerintah pusat yang ditunjang oleh PAD maka sudah seharusnya setiap pengeluaran dan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah termasuk Provinsi Sumatera Barat mampu memberikan dampak bagi perekonomian terutama terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

Bukan hanya faktor pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah saja yang menjadi hal yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Barat. Tingkat pengangguran juga memiliki kaitan yang erat dengan tingkat kemiskinan (Ishak, 2020). Didalam teori Lewis dijelaskan bahwa tujuan dari proses pembangunan khusus ditujukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis beranggapan bahwa di negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, tetapi memiliki masalah kekurangan modal dan keluasan tanah yang terbatas (Sukirno, 2006)

Pengangguran mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Baik di negara berkembang maupun di negara maju, pengangguran merupakan keadaan yang keberadaannya tidak terelakkan. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan sebab pengangguran sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah kerawanan berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, politik dan kemiskinan (Amalia,2012).Peningkatan angka kemiskinan ini selanjutnya menekan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya menciptakan kemiskinan.

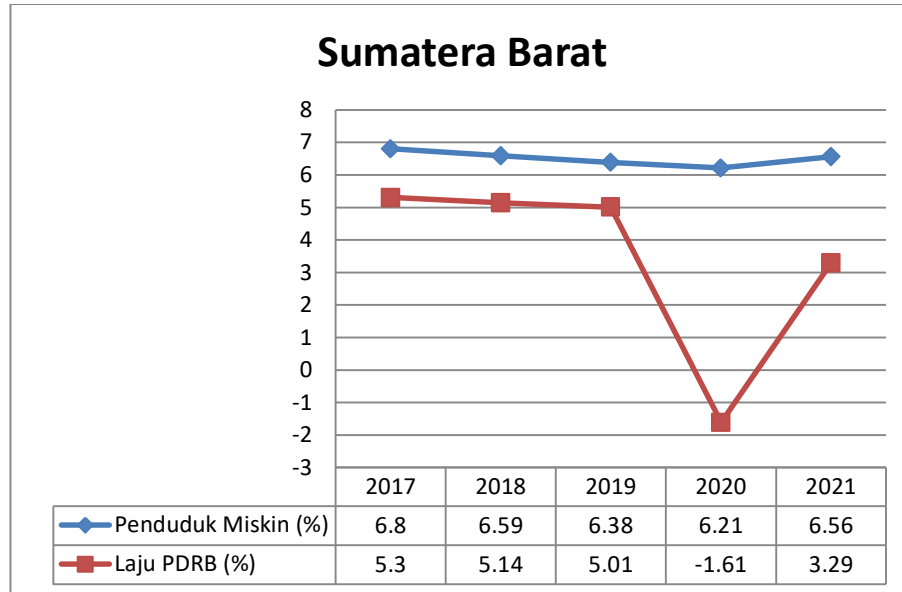
**Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Sumatera Barat tahun 2017-2021 (Persen)**



Sumber : BPS Provinsi Sumbar

Gambar 1.4 menunjukkan persentase tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat pada tahun 2017-2021. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Barat terus mengalami naik turun selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2020 merupakan angka tertinggi untuk persentase tingkat pengangguran yaitu sebesar 6,29 persen. Dan pada tahun 2019 merupakan angka terendah yaitu sebesar 5.08 persen.

Gambar 1.5 Persentase Penduduk miskin dan Laju PDRB atas harga konstan di Sumatera Barat tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Sumbar

Pada tabel 1.5 berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik provinsi Sumatera Barat memperlihatkan pada tahun 2021 penduduk miskin dan laju PDRB perkapita mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimana seharusnya jika laju PDRB atas harga konstan naik maka persentase penduduk miskin akan mengalami penurunan. Namun pada data di atas terlihat laju PDRB atas harga konstan naik pada tahun 2021 menjadi 3.29 dari tahun sebelumnya sebesar -1.61, dan persentase penduduk miskin juga mengalami kenaikan sebesar 6.56 pada tahun 2021 dimana pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 6.21%. Hal ini artinya terdapat kenaikan persentase penduduk miskin dan laju PDRB atas harga konstan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang harusnya terjadi. Dari data di atas perlunya dikaji sejauh mana pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

Penghapusan permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan, termasuk di negara Indonesia. Pemerintah provinsi Sumatera Barat telah memberikan perhatian lebih terhadap upaya pengentasan kemiskinan ini. Namun hal tersebut belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara merata diseluruh Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena beberapa wilayah terpelosok yang sulit dijangkau oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan kemiskinan tersebut. Selain itu juga terdapat pelaku-pelaku yang menyalah gunakan upaya penanggulangan kemiskinan ini. Oleh sebab itu perlu di cari hal hal apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian mengenai kemiskinan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Diantaranya penelitian oleh Akhir (2019). Didalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan dan negatif antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2011 hingga 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Rejekingsih (2012), yang meneliti tentang analisis kemiskinan Jawa Tengah dengan menggunakan metode FEM menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan dapat dikurangi dengan peningkatan variabel pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Hapsoro dan Gunanto (2013) menegaskan bahwa variabel makroekonomi seperti PDRB, pengangguran dan tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Walaupun sudah banyak penelitian mengenai kemiskinan, usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan belum merata keseluruh kabupaten/kota,

padahal dampak kemiskinan sangat buruk bagi perekonomian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penting untuk mengkaji sejauh mana strategi pembangunan nasional dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat inflasi dan menekan angka pengangguran. Dengan demikian maka penelitian ini hendak menjawab bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 hingga tahun 2021 ?
2. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 hingga tahun 2021?
3. Sejauh mana pengaruh pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 hingga tahun 2021?

C. Batasan Masalah

Agar lebih fokus dalam mendalami penelitian maka penulis mempersempit cakupan pembahasan dalam penelitian ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan pengangguran yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2017-2021.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
3. Menganalisis pengaruh pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian :

1. Untuk Akademis, memberikan pengetahuan secara ilmiah kepada para mahasiswa, dosen dan peneliti mengenai kemiskinan yang ada di Sumatera Barat.

2. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru sekaligus menambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut masalah kemiskinan.